

ABSTRAK

Seiring perkembangan jaman, penggunaan klausula baku digunakan terkait dengan efisiensi waktu dan proses. Akan tetapi dalam praktek cenderung terjadi banyak penyimpangan yang berkaitan dengan pencantuman klausula yang dilarang oleh undang-undang, dalam hal ini UU Perlindungan Konsumen.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai pengaturan penerapan klausula baku dalam perjanjian pembiayaan konsumen serta upaya hukum yang digunakan dalam memberikan perlindungan terhadap pelanggaran penerapan klausula baku ditinjau dari UU Perlindungan Konsumen. Pengaturan penerapan klausula baku yang dimaksud adalah untuk melindungi konsumen serta memberikan rasa aman dalam pembuatan perjanjian antara konsumen dengan pelaku usaha dan menumbuhkan rasa tanggung jawab di kalangan pelaku usaha untuk mencantumkan klausula baku yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian ini menggunakan penelitian Yuridis Normatif. Pendekatan yang digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini adalah pendekatan konsep (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*), dengan metode ini kemudian dapat ditentukan bahwa penerapan suatu perjanjian yang memuat kontrak baku harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini tersirat pada pasal 18 UU Perlindungan konsumen yang mengatur mengenai larangan pencantuman klausula baku. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan kedua belah pihak sehingga masing-masing pihak memiliki kedudukan yang setara berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak. Akibat hukum yang timbul terhadap pencantuman klausula baku yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu batal demi hukum, sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat (3) UU Perlindungan Konsumen.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Klausula Baku, Perjanjian Pembiayaan Konsumen

ABSTRACT

Along with the times, the use of standard clauses used in relation for time and process efficiency. However, in practice there tends to be a lot of irregularities relating to the inclusion of clauses which are prohibited by law, in this case the Consumer Protection Act.

This research aims to provide an explanation regarding the application arrangements of standard clauses in consumer financing agreement and the legal effort that are used in providing protection against breaches application of standard clause in terms of the Consumer Protection Act. Arrangements application of standard clauses which are intended to protect consumers and provide a sense of security in making agreements between consumers and businesses and foster a sense of responsibility among businesses to include standard clauses in accordance with the legislation in force.

This research uses Legal Normative Method. Approach that is used to analyze the legal issues in this research is conceptual approach, statute approach and case approach, with this method can be determined that the application of an agreement containing standard contract should pay attention to the rules legislation in force, in this case implied in Article 18 consumer Protection Act which regulates the prohibition inclusion of standard clauses. It is intended to protect the interests of both parties so that each party has an equal position based on the principle of freedom of contract. Legal consequences arising against the inclusion of standard clauses which are not in accordance with the provisions of the applicable law is null and void, as provided in Article 18 paragraph (3) Consumer Protection Law.

Keywords: Consumer Protection, Clause Raw, Consumer Financing Agreement